

KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KUALITAS INPUT AKADEMIK SISWA DI SMA NEGERI 3 BANDUNG

Firman Maulana¹, Rohimat^{2*}, Cucu Nurjanah³, R. Supyan Sauri⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email Koresponden: uzank.rohimat.1@gmail.com^{2*}

ABSTRACT

The zoning policy in PPDB aims to improve equitable access to public schools by prioritizing students from surrounding areas. As one of the leading schools in Bandung, SMA Negeri 3 Bandung was the focus of this study to examine how the zoning policy affects the academic quality and socioeconomic backgrounds of admitted students. This study employs a descriptive qualitative approach with comparative data analysis between students admitted through the zoning pathway and those admitted through the achievement pathway. Data were collected through direct observation, interviews, and document analysis. The study's results show that the zoning policy significantly affects the diversity of students' academic and socioeconomic backgrounds. In addition, the zoning policy contributes to greater diversity of perspectives and social experiences in the teaching and learning process at SMA Negeri 3 Bandung. However, this policy also poses challenges in classroom management and curriculum adjustments to accommodate the diversity of students' academic abilities. This study recommends further adjustments to the zoning policy, particularly by providing sufficient resources to support students with weaker academic backgrounds, and by improving remedial programs and tutoring to help students adapt to the academic standards of SMA Negeri 3 Bandung.

Keywords: Zoning Policy, Student Input Academic Quality, New Student Admissions (PPDB), Educational Equity

ABSTRAK

Kebijakan zonasi dalam PPDB bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di sekolah-sekolah negeri dengan memprioritaskan siswa yang berasal dari daerah sekitar sekolah. Sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Bandung, SMA Negeri 3 Bandung menjadi objek penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi kualitas akademik dan latar belakang sosial-ekonomi siswa yang diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif deskriptif dengan analisis data yang bersifat komparatif antara siswa yang diterima melalui jalur zonasi dan siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh signifikan terhadap keberagaman latar belakang akademik dan sosial-ekonomi siswa yang diterima. Selain itu, kebijakan zonasi juga berkontribusi pada peningkatan keberagaman perspektif dan pengalaman sosial dalam proses belajar-mengajar di SMA Negeri 3 Bandung. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan dalam pengelolaan kelas dan penyesuaian kurikulum untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan akademik siswa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan zonasi, terutama dalam penyediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung siswa dengan latar belakang akademik yang lebih lemah, serta peningkatan program remedial dan bimbingan belajar untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan standar akademik SMA Negeri 3 Bandung.

Kata Kunci: Kebijakan Zonasi, Kualitas Input Siswa, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerataan Pendidikan

Cara sitasi: Firman Maulana, F., Rohimat., Nurjanah, C., & Sauri, S. (2026). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Terhadap Kualitas Input Akademik Siswa Di Sma Negeri 3 Bandung. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 7 (2), 900-906.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sebuah negara (Hanushek & Woessmann, 2020). Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Di Indonesia, pemerataan pendidikan menjadi salah satu tujuan utama dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat (Vega et al., 2024). Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi siswa di seluruh wilayah Indonesia agar dapat mengakses pendidikan berkualitas (Kaffa et al., 2021), terutama di sekolah-sekolah favorit. Dengan sistem zonasi, peserta didik yang tinggal dalam jarak yang lebih dekat dengan sekolah tersebut memiliki kesempatan untuk diterima. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara siswa dari daerah perkotaan dan pedesaan serta menciptakan keseimbangan dalam komposisi siswa yang diterima di sekolah-sekolah negeri. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebijakan zonasi dari perspektif pemerataan akses, persepsi masyarakat, efektivitas implementasi, dan distribusi peserta didik antarsekolah (Susanto et al., 2024). Penelitian yang secara khusus menempatkan kualitas input siswa sebagai fokus analisis masih relatif terbatas, terutama pada konteks sekolah negeri yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah unggulan.

Penelitian tentang zonasi di Indonesia umumnya lebih banyak menyoroti dimensi akses dan keadilan distribusi, sedangkan perubahan karakteristik akademik awal, kesiapan belajar, dan latar belakang sosial-ekonomi siswa yang diterima belum banyak dianalisis sebagai satu kesatuan konsep kualitas input. Namun, perubahan komposisi siswa akibat zonasi dapat berimplikasi langsung terhadap strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, program remedial, dan kebijakan mutu sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan memusatkan analisis pada bagaimana kebijakan zonasi mengubah kualitas input siswa di SMA Negeri 3 Bandung, baik dari aspek akademik maupun sosial-ekonomi. Fokus tersebut memperkaya kajian kebijakan zonasi karena pemerataan akses tidak hanya dipahami sebagai persoalan peluang masuk sekolah, tetapi juga sebagai perubahan struktur input pendidikan yang harus dikelola secara pedagogis dan kelembagaan.

SMA Negeri 3 Bandung sebagai salah satu sekolah favorit di kota ini juga ikut mengimplementasikan kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sebelum kebijakan zonasi diterapkan, SMA Negeri 3 Bandung dikenal sebagai sekolah yang memiliki persaingan ketat dalam penerimaan siswa. Banyak siswa yang memiliki kemampuan akademik sangat baik harus bersaing dengan siswa lainnya yang berasal dari berbagai wilayah. Penerapan sistem zonasi ini diharapkan dapat membawa pemerataan jumlah siswa yang diterima dan meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sekolah-sekolah favorit.

Namun, meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan (Nurdin et al., 2024), pelaksanaannya menghadirkan beberapa fenomena dan kondisi yang perlu dicermati lebih lanjut. Kebijakan zonasi dapat mempengaruhi kualitas input siswa dalam beberapa hal, di antaranya dalam hal keberagaman latar belakang siswa dan kesetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah dampak kebijakan ini terhadap kualitas input siswa yang diterima di SMA Negeri 3 Bandung. Sebagai sekolah unggulan, SMA Negeri 3 Bandung memiliki standar akademik yang tinggi dan telah lama menjadi pilihan utama bagi siswa dengan prestasi akademik unggul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh kebijakan sistem zonasi terhadap kualitas input siswa di SMA Negeri 3 Bandung. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui apakah kebijakan zonasi berdampak pada kualitas akademik siswa yang diterima di SMA Negeri 3 Bandung; 2) mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi dapat menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan tanpa menurunkan kualitas siswa yang diterima;

serta 3) menganalisis apakah keberagaman latar belakang sosial-ekonomi dan akademik siswa yang diterima melalui sistem zonasi memberikan dampak positif atau negatif terhadap pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama dalam penelitian ini terletak pada perubahan karakteristik input siswa setelah diterapkannya kebijakan zonasi. SMA Negeri 3 Bandung sebagai sekolah negeri yang memiliki reputasi akademik tinggi menghadapi tantangan dalam menjaga mutu pembelajaran ketika komposisi peserta didik menjadi semakin heterogen. Kebijakan zonasi berpotensi memperluas akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, tetapi pada saat yang sama menuntut sekolah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan variasi kemampuan akademik awal dan latar belakang sosial-ekonomi siswa. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan zonasi memengaruhi kualitas input siswa dan bagaimana sekolah merespons perubahan tersebut dalam rangka menjaga mutu pendidikan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan zonasi dan implikasinya terhadap kualitas input siswa di SMA Negeri 3 Bandung. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terkait langsung dengan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, arsip PPDB, data penerimaan peserta didik, data nilai akademik awal, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Dengan demikian, data primer digunakan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan strategi aktor sekolah, sedangkan data sekunder digunakan untuk mengonfirmasi perubahan karakteristik input siswa setelah kebijakan zonasi diterapkan..

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara. **Pertama**, observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat proses penerimaan siswa melalui jalur zonasi di SMA Negeri 3 Bandung. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap prosedur yang diterapkan selama PPDB. **Kedua**, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan kebijakan zonasi di SMA Negeri 3 Bandung, termasuk kepala sekolah, guru, dan beberapa orang tua siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai persepsi mereka tentang kebijakan zonasi, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap kualitas siswa yang diterima. **Ketiga**, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mencakup informasi terkait dengan kualitas input siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Data yang digunakan dalam studi dokumentasi ini meliputi hasil ujian masuk, nilai rata-rata siswa, data kelulusan, serta informasi mengenai latar belakang akademik siswa.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan metode untuk memverifikasi data dari berbagai sumber yang berbeda (Nurfajriani et al., 2024). Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil data atau informasi dari kepala sekolah, guru, panitia PPDB, orang tua, dan dokumen sekolah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer dari wawancara dan observasi digunakan untuk memahami proses implementasi serta respons sekolah terhadap perubahan input siswa. Data sekunder dari dokumen PPDB dan arsip akademik digunakan untuk memperkuat analisis mengenai perubahan kemampuan akademik awal dan latar belakang siswa yang diterima melalui jalur zonasi.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi di SMA Negeri 3 Bandung. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, panitia PPDB, orang tua siswa, dan siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Kepala sekolah dan panitia PPDB dipilih karena memiliki pemahaman mengenai mekanisme kebijakan dan proses seleksi peserta didik. Guru dipilih karena berinteraksi langsung dengan siswa di kelas dan dapat memberikan informasi mengenai kesiapan belajar serta variasi kemampuan akademik siswa. Orang tua

dan siswa dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman penerimaan melalui jalur zonasi serta persepsi terhadap dampak kebijakan tersebut. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman data dan prinsip kecukupan informasi, yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang relatif konsisten.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan. **Pertama**, reduksi data (*data reduction*) yang dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari hasil wawancara, mengkode data berdasarkan tema dan pola yang muncul, mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, dan membuat memo analitik untuk mencatat ide-ide awal tentang pola dan tema yang ditemukan. **Kedua**, penyajian data dilakukan dengan cara membuat matriks untuk menampilkan data dari berbagai sumber, membuat diagram untuk menunjukkan hubungan antar tema, menyajikan kutipan-kutipan penting dari informan, dan mendeskripsikan temuan dalam narasi yang sistematis. **Ketiga**, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan cara menguji kembali hasil analisis terhadap data yang tersedia, melakukan triangulasi, dan mendiskusikan temuan dengan para ahli. Kesimpulan akhir dirumuskan dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman konsep dan dasar kebijakan zonasi dalam PPDB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepala sekolah dan guru telah memahami tujuan utama kebijakan zonasi dalam SPMB. Mayoritas responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa kebijakan zonasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara konseptual kebijakan zonasi telah dipahami sebagai instrumen keadilan pendidikan, bukan sekadar mekanisme administratif penerimaan siswa. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman aktor pelaksana terhadap tujuan kebijakan itu sendiri. Hill & Hupe (2014) menegaskan bahwa pemahaman tujuan kebijakan merupakan prasyarat agar implementasi tidak menyimpang dari desain awal kebijakan. Namun demikian, masih terdapat sebagian responden yang ragu atau bahkan tidak sependapat, khususnya pada aspek pemahaman prinsip pemerataan akses dan dasar hukum kebijakan zonasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman kebijakan belum sepenuhnya merata di kalangan pelaksana. Implementasi kebijakan zonasi di Indonesia masih dihadapkan pada masalah literasi kebijakan, terutama pada tingkat sekolah, sehingga kebijakan kerap dipahami secara prosedural tanpa pemaknaan filosofis yang utuh (Madjid, 2023).

Sebaliknya, pemahaman responden terhadap perbedaan jalur penerimaan (zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua) tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional sekolah relatif siap melaksanakan kebijakan SPMB. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nurdin et al. (2024) yang menyebutkan bahwa kejelasan desain jalur penerimaan merupakan salah satu kekuatan kebijakan zonasi di Indonesia. Akan tetapi, pemahaman terhadap mekanisme teknis penentuan wilayah zonasi masih menjadi titik lemah, yang mengindikasikan perlunya penguatan bimbingan teknis dan transparansi pemetaan wilayah.

Dampak Kebijakan Zonasi terhadap Mutu Input Akademik Siswa

Seluruh responden menyatakan bahwa zonasi memengaruhi kemampuan akademik awal peserta didik, meningkatkan keragaman latar belakang akademik, serta mengubah kualitas input siswa dibandingkan sebelum zonasi diterapkan. Konsensus ini menunjukkan bahwa zonasi bukan hanya kebijakan distribusi peserta didik, tetapi kebijakan yang secara langsung mengubah karakteristik input pendidikan di sekolah. Peningkatan heterogenitas akademik siswa merupakan dampak paling nyata dari kebijakan zonasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto et al. (2024) yang menunjukkan bahwa zonasi berhasil mengurangi konsentrasi siswa berprestasi di sekolah tertentu dan mendorong distribusi yang lebih merata antar sekolah. Dengan demikian, perubahan kualitas input siswa yang dirasakan oleh responden tidak dapat dimaknai secara

simpliciter sebagai penurunan mutu, melainkan sebagai transformasi struktur input yang sebelumnya sangat homogen.

Dampak zonasi juga dirasakan pada kesiapan belajar siswa di awal tahun pelajaran. Perbedaan kemampuan akademik, latar belakang keluarga, dan dukungan belajar di rumah menyebabkan variasi tingkat kesiapan siswa. Temuan ini konsisten dengan laporan RISE Programme (2023) yang menyimpulkan bahwa kebijakan zonasi di Indonesia memengaruhi kesiapan belajar dan capaian awal siswa, sehingga sekolah perlu melakukan penyesuaian strategi pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan zonasi menuntut sekolah untuk tidak hanya menerima perubahan input, tetapi juga mengelola dampaknya secara pedagogis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak dapat dinilai hanya dari perspektif berhasil atau tidak berhasil dalam mempertahankan standar akademik sekolah. Kebijakan zonasi justru perlu dibaca sebagai perubahan struktur input pendidikan yang menggeser komposisi siswa dari pola seleksi berbasis prestasi akademik menuju pola seleksi berbasis kedekatan domisili. Pergeseran ini membawa konsekuensi pedagogis karena guru menghadapi peserta didik dengan variasi kemampuan akademik awal yang lebih lebar. Dalam jangka menengah, kondisi tersebut dapat memengaruhi strategi pembelajaran, pola pengelompokan siswa, kebutuhan asesmen diagnostik, serta intensitas program remedial. Oleh karena itu, keberhasilan zonasi tidak cukup diukur dari keterpenuhan kuota penerimaan siswa, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam mengelola heterogenitas input agar tidak berkembang menjadi kesenjangan capaian belajar di dalam kelas.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Zonasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan zonasi relatif beragam. Dukungan kebijakan, regulasi, dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dipersepsikan secara tidak seragam oleh responden. Sebagian merasa sangat terbantu, sementara sebagian lainnya menilai dukungan tersebut masih lemah. Variasi ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan Adinda (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas zonasi sangat bergantung pada kapasitas dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik di lapangan. Sebaliknya, mayoritas responden sepakat bahwa tingkat pemahaman warga sekolah dan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan zonasi. Literasi kebijakan yang rendah di kalangan orang tua sering kali menjadi sumber resistensi terhadap zonasi. Iqbalurroza (2021) menunjukkan bahwa sikap orang tua yang masih berorientasi pada sekolah favorit menjadi salah satu hambatan utama dalam penerimaan kebijakan zonasi. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis.

Faktor teknologi informasi dan keakuratan data domisili juga diakui sebagai determinan penting. Ketersediaan sistem TI yang andal dan data yang valid mempermudah pelaksanaan zonasi, sementara keterbatasannya berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan publik. Selain itu, hampir seluruh responden mengakui bahwa kondisi geografis wilayah dan ketersediaan sarana prasarana sekolah berpengaruh langsung terhadap keberhasilan zonasi. Jarak rumah ke sekolah, akses transportasi, dan kapasitas fasilitas menjadi faktor struktural yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan pemerataan akses pendidikan akan sulit berhasil tanpa diiringi pemerataan sarana dan prasarana antar wilayah. Dalam konteks ini, penerimaan orang tua terhadap kebijakan zonasi menjadi faktor penentu yang berinteraksi dengan kondisi struktural tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan sistem zonasi dalam PPDB berdampak terhadap perubahan kualitas input siswa di SMA Negeri 3 Bandung. Perubahan tersebut terlihat pada meningkatnya keragaman kemampuan akademik awal, kesiapan belajar, dan latar belakang sosial-

ekonomi peserta didik yang diterima. Kebijakan zonasi memperluas akses siswa yang berdomisili di sekitar sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah negeri yang memiliki reputasi akademik tinggi. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan bagi sekolah karena heterogenitas input siswa menuntut penyesuaian strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan program pendampingan akademik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas input siswa setelah zonasi tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai penurunan mutu. Perubahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai transformasi komposisi peserta didik dari sistem yang sebelumnya cenderung berbasis seleksi akademik menuju sistem yang lebih menekankan pemerataan akses. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam mengelola keragaman siswa melalui asesmen diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, program remedial, dan dukungan belajar yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya keseimbangan antara prinsip pemerataan akses dan strategi penjaminan mutu agar kebijakan zonasi tidak hanya menghasilkan distribusi siswa yang lebih merata, tetapi juga tetap mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

REKOMENDASI

Pertama, sekolah perlu mengembangkan asesmen diagnostik pada awal tahun ajaran untuk memetakan kemampuan akademik awal, kesiapan belajar, dan kebutuhan pendampingan siswa yang diterima melalui jalur zonasi. Hasil asesmen tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program matrikulasi, remedial, dan bimbingan akademik. Kedua, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi agar variasi kemampuan siswa dapat dikelola secara lebih efektif di dalam kelas. Ketiga, sekolah perlu memperkuat komunikasi dengan orang tua agar dukungan belajar di rumah dapat berjalan sejalan dengan program akademik sekolah. Keempat, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan zonasi diikuti dengan pemerataan sarana, prasarana, dan dukungan sumber daya antarsekolah. Pemerataan akses tidak akan optimal jika sekolah penerima siswa zonasi tidak memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain campuran agar perubahan kualitas input siswa dapat dianalisis secara lebih objektif melalui kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian lanjutan juga perlu membandingkan beberapa sekolah dengan karakteristik berbeda, seperti sekolah unggulan, sekolah pinggiran, dan sekolah dengan kapasitas terbatas. Selain itu, penelitian longitudinal diperlukan untuk melihat dampak jangka menengah kebijakan zonasi terhadap capaian belajar, adaptasi sosial siswa, dan mutu sekolah. Kajian semacam ini penting agar evaluasi kebijakan zonasi tidak berhenti pada proses penerimaan siswa, tetapi juga mencakup konsekuensi pedagogis dan kelembagaan setelah siswa diterima di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, S. P. (2025). Revisiting the Equity Promise of School Zoning Policies in Indonesia: Between Idealism and Implementation. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(2), 78–87. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v3i2.214>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. In *The Economics of Education* (pp. 171–182). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8>
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (Third Edition). SAGE.
- Iqbalurroza, Z. (2021). Motif orangtua menyekolahkan anaknya di luar zonasi di Kota Surabaya. *Paradigma*, 10(1).
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan penerapan sistem zonasi. 5(1), 1870–1877.
- Madjid, A. (2023). Dinamika kebijakan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner*, 2(2).

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publications, Inc.
- Nurdin, Zulfa, H. S. A., Setiawan, F. A. B., Nurkhaeratunnisa, & Fadli, R. M. (2024). Kebijakan zonasi sekolah di Indonesia: Tinjauan literatur tentang implementasi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), 1–16.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- RISE Programme. (2023). *The Effects of School Zoning Policy on Student Learning Outcomes*. SMERU Research Institute.
- Susanto, R., Judijanto, L., Irsyad, I., & Fitri, S. A. (2024). The impact of implementing school zoning policy on inequality of access to education at the Junior High School level. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(8), 556–571. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.8.28>
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2024). Kesetaraan akses pendidikan: Analisis pengimplementasian nilai Pancasila dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. 1(2), 44–57.